

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan perbankan adalah salah satu industri yang paling penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi. Lembaga keuangan ini, sebagai alat penghimpun dana, memiliki kemampuan untuk menggerakkan pembangunan dan penyaluran dana ke berbagai proyek penting di berbagai industri bisnis. Demikian pula, lembaga keuangan ini dapat memberikan dana kepada pengusaha atau kelompok masyarakat yang membutuhkan dana untuk mempertahankan bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia telah berkembang dengan cepat.

Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, perbankan syariah memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian. Perbankan syariah dan perbankan konvensional sama-sama berperan dalam ekonomi Indonesia (Hayati, 2014). Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam transaksi keuangan dan operasional. Perbankan syariah menerapkan prinsip hasil dan risiko (*profit and loss sharing*), atau pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi prinsip ini tidak berlaku untuk perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (Hasan, 2011).

Perbankan, baik untuk masyarakat, industri besar, menengah, atau bawah, memiliki peran dan pengaruh yang signifikan di Indonesia. Ini disebabkan oleh

fakta bahwa bank diminta untuk meningkatkan modal atau menyimpan uang masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Banyak kelompok masyarakat mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menerapkan sistem ekonomi Islam dalam perekonomian nasional. Desakan ini muncul seiring melemahnya sistem ekonomi kapitalis yang dianggap tidak lagi mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi saat ini (Irawan, 2021). Kelompok ekonomi serta para praktisi perbankan Muslim berusaha merespons tuntutan berbagai pihak yang menginginkan tersedianya layanan transaksi keuangan yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bagaimana posisi bank syariah di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki banyak suku dan agama, apakah dapat diterima pada kalangan non-Muslim? Bagi perbankan syariah, memahami persepsi masyarakat non-Muslim menjadi hal yang penting. Meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, bank syariah pada dasarnya bersifat universal dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan perluasan edukasi dan layanan kepada masyarakat non-Muslim untuk menjaga keberlanjutan serta memperkuat eksistensi perbankan syariah. Persepsi adalah suatu proses yang membuat seseorang memperoleh pemahaman baru; dengan kata lain, persepsi mengubah suatu makna menjadi informasi yang dapat dipahami. Indonesia sendiri menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah yang relatif stabil dan cenderung meningkat dibandingkan beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 49,2% pada tahun 2011. Keberadaan lembaga keuangan syariah maupun lembaga sosial berbasis syariah idealnya mampu

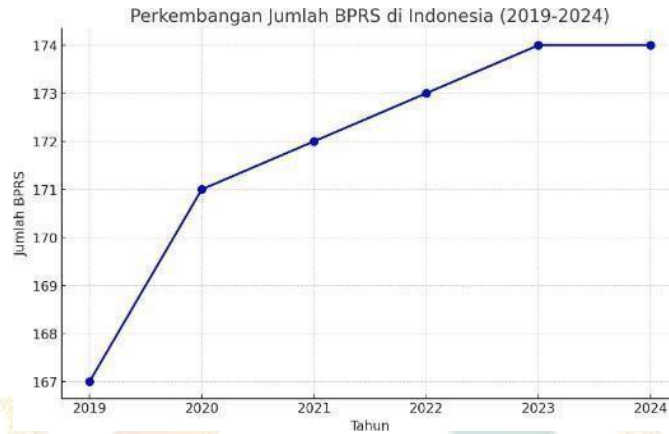
semakin mendorong terwujudnya kemaslahatan dan keadilan sosial, sesuai dengan tujuan utama dari sistem ekonomi syariah (Bagus, 2022).

BPRS pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yang mengatur operasional bank dengan prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa BPRS menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, pengaturan lebih rinci mengenai BPRS tercantum dalam Surat Keputusan Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 mengenai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, keberadaan BPRS juga dijelaskan dalam SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah serta SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB, semuanya diterbitkan pada 12 Mei 1999, sebagai landasan operasional perbankan syariah skala mikro.

BPRS juga dikenal sebagai *Bank at-Tamwil as-Sya'bi al-Islami*, yaitu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, namun tidak memberikan layanan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran (UU No 21, 2008).

Pada tahun 2024, total jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia mencapai 174 unit. BPRS bagian dari sistem perbankan syariah yang khusus menangani segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka berfokus pada layanan keuangan yang mengikuti

aturan Islam, seperti larangan riba (bunga) dan investasi pada kegiatan yang diharamkan dalam syariah.



Grafik 1.1

Grafik 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Dari data tersebut, terlihat adanya tren stabil dalam jumlah BPRS, dengan peningkatan kecil setiap tahun hingga mencapai total 174 BPRS pada tahun 2024. Perkembangan yang stabil ini mencerminkan pertumbuhan yang hati-hati namun berkelanjutan dalam sektor perbankan syariah, khususnya di bidang pembiayaan rakyat yang berfokus pada UMKM. Meskipun tidak terjadi lonjakan besar dalam jumlah, kehadiran BPRS tetap penting untuk mendukung inklusi keuangan syariah di berbagai daerah.

Selanjutnya perlu dikaji bagaimana peran BPRS terhadap wilayah-wilayah di Indonesia, khususnya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bekasi merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonominya

mencapai 6,9%, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,2%. Upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan misi pembangunan Kota Bekasi, yakni mendorong penguatan sektor UMKM, meningkatkan investasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. (Annisa, 2017). Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Bekasi, memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyedia akses permodalan dan pendukung pengembangan usaha masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting terutama dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Bekasi.

BPRS Patriot Bekasi telah melalui beberapa tahap transformasi sejak awal pendiriannya. Lembaga ini pertama kali beroperasi dengan nama PD BPRS Kota Bekasi, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 yang ditetapkan pada 30 November 2005. Izin operasionalnya diberikan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/62/KEP.GBI/2006 tanggal 31 Agustus 2006, yang sekaligus ditetapkan sebagai hari jadinya. Pada 13 Juli 2009, dilakukan perubahan nama menjadi PT BPRS Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009. Transformasi yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2013, ketika dilakukan perubahan logo dan penggantian nama menjadi PT BPRS Patriot Bekasi, yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 15/2/KEP.Dir.Pbs/2013.

Sementara itu pada BPRS Patriot Bekasi pada tahun 2023-2024 dilihat dari laporan keuangan yang peneliti ambil dari situs resmi BPRS Patriot Bekasi bisa kita lihat dari tabel dibawah ini.

KETERANGAN	DATA KEUANGAN				PERUBAHAN	
	31 Des 2024		31-Dec-23		Nominal	%
	Nominal	%	Nominal	%		
Murabahah	280.799.811	57,85%	276.456.173	59,88%	4.343.638	1,57%
Musyarakah	158.879.943	32,73%	149.042.424	32,28%	9.837.519	6,60%
multi jasa	39.582.957	8,16%	35.598.895	7,71%	3.984.062	11,19%
Mudharabah	5.850.682	1,21%	-	0,00%	5.850.682	0,00%
Al-Qordh	260.881	0,05%	579.881	0,13%	(319.000)	-55,01%
TOTAL PEMBIAYAAN	485.374.274	100,00%	461.677.373	100,00%	23.696.901	5,13%

Sumber: <https://bprspatriot.co.id/>

Melalui dukungan lembaga keuangan syariah seperti BPRS, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu membantu mereka menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di wilayah Kota Bekasi.

Adapun beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Didit Supriyadi dan Aulia Delvina (2018) dengan judul “Strategi Perbankan Syariah dalam Upaya Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan IB Masalah di Bank BJB Syariah KCP Cianjur” hasil penelitian diketahui bahwa Self Promotion dan pemilihan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap jumlah nasabah tabungan iB Masalah di Bank BJB Syariah KCP Cianjur.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rifdah Atika Pasaribu dan Ahmad Perdana Indra dengan judul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia” hasil dari penelitian ini berkontribusi

pada pemahaman yang lebih baik tentang peran BPRS dalam mendukung sektor UMKM dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mempromosikan pengembangan UMKM yang berkelanjutan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rina Maulina yang berjudul “Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm (Studi Pada PT. BPRS Baiturrahman)” Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, BPRS Baiturrahman telah banyak memberikan kontribusi/kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan menerapkan sistem *murabahah* (jual beli).

Penelitian keempat dilakukan oleh Abdul Aziiz Ahmad Fauzi dengan judul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di kabupaten Karawang berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang memerlukan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha.

Penelitian Kelima dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Bangka Belitung” Hasil dari penelitian tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya sebatas penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha.

Kehadiran bank syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Bank syariah memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam upaya mendorong inklusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Di wilayah Bekasi, bank syariah semakin penting karena populasi Muslim yang signifikan dan potensi besar dalam sektor ekonomi syariah. Bank syariah menawarkan solusi keuangan berbasis etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), yang membuatnya semakin diminati oleh masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan syariah.

Di Bekasi, perbankan syariah dapat menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat inklusi keuangan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Diakatakan bisa menjadi motor penggerak karena Perbankan Syariah memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Kota Bekasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai sistem perbankan syariah dan produk-produknya masih belum merata. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor lain seperti persepsi negatif terhadap lembaga keuangan syariah serta minimnya sosialisasi dari pihak bank maupun regulator mengenai manfaat dan keunggulan layanan perbankan syariah (Subagja, 2022). Permasalahan yang dihadapi antara

lain rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Bekasi mengenai perbankan syariah, yang salah satunya dipengaruhi oleh dominasi perbankan konvensional. Beberapa kendala juga muncul dalam proses pengembangan perbankan syariah, antara lain; pemahaman masyarakat yang masih kurang tepat mengenai operasional bank syariah, regulasi perbankan yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional bank syariah, keterbatasan jaringan kantor layanan syariah, serta minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perbankan syariah.

Perkembangan yang cukup pesat terjadi pada sektor perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini mengatur secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan perbankan syariah maupun unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, jenis kegiatan usaha, serta mekanisme operasionalnya. Undang-undang tersebut juga menetapkan tiga jenis lembaga perbankan syariah yang diakui, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam era digital, lembaga keuangan berbasis syariah memiliki peran strategis dalam menawarkan solusi keuangan yang lebih adaptif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu dampak positifnya adalah kontribusi dalam membangun ekonomi sosial, baik dari perspektif mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, hal ini dapat dilihat melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peran perbankan syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan aspek yang penting untuk diteliti dan dievaluasi, baik dari sisi teori maupun kajian akademis. Diharapkan, keberadaan perbankan syariah mampu meningkatkan arus investasi dan pembiayaan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah Kota Bekasi. (Wahyunitasari, 2023).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan, maka masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Persaingan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menghadapi tantangan dalam bersaing dengan perbankan konvensional yang lebih dikenal dan memiliki jaringan yang lebih luas, mengakibatkan pangsa pasar perbankan syariah tetap kecil
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, Banyak masyarakat di Kota Bekasi yang belum memahami konsep dan manfaat perbankan syariah, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam sistem keuangan ini.
- c. Persepsi negatif terhadap perbankan syariah, Beberapa segmen masyarakat masih memiliki persepsi negatif atau skeptis terhadap perbankan syariah, yang dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan layanan tersebut.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

a. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah pembahasan meluas ke luar tujuan penelitian dan agar analisis tetap terfokus, penelitian ini menetapkan batasan ruang lingkup tertentu sehingga arah kajian dapat lebih terjaga dan sesuai dengan sasaran penelitian. Pertama, penelitian ini akan berfokus pada sektor perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Kota Bekasi dan tidak akan mencakup perbankan konvensional. Selain itu, area geografis yang diteliti akan terbatas hanya pada Kota Bekasi. Dari segi waktu, penelitian akan mempertimbangkan data dan informasi terkini dalam kurun waktu terdekat untuk mendapatkan gambaran yang relevan mengenai dinamika perbankan syariah dan perekonomian lokal.

b. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan agar dapat membuahkan hasil maksimal sesuai dengan latar belakang dan tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Apa peran BPRS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Bekasi?
- b. Bagaimana program keberadaan ekonomi yang dijalankan oleh BPRS Patriot Bekasi?
- c. Bagaimana dampak BPRS dalam mengembangkan usaha mikro Kota Bekasi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Pada proses penulisan proposal ini, peneliti akan mendapatkan tujuan-tujuan seperti berikut:

1. Untuk menganalisis dan menilai kontribusi BPRS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Bekasi terhadap layanan keuangan.
2. Untuk mengukur pengaruh program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BPRS di Kota Bekasi.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor dampak BPRS terhadap perkembangan mikro dan usaha kecil di Kota Bekasi.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai peran strategis fungsi intermediasi dan pemberdayaan yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mendorong perekonomian masyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga perbankan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan strategi pemasaran dan edukasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan perbankan syariah dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Bekasi.

E. Tinjauan Pustaka

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	<p>Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bandar Lampung</p> <p>(Apridhika, 2020)</p>	<p>Penelitian ini diperoleh bahwa Peran BPRS Bandar Lampung melalui pembiayaan murabahah dan ijarah, Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian pembiayaan: Faktor pendukung, yaitu usaha yang dijalankan sesuai syariat Islam, BPRS mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Faktor penghambat, yaitu untuk sektor UKM bersaing dengan bank umum, kurangnya tingkat pemahaman kepada produk bank. Penelitian ini diperoleh bahwa Peran BPRS Bandar Lampung melalui pembiayaan murabahah dan ijarah, Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian pembiayaan: Faktor pendukung, yaitu</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Lokasi penelitian c. Tahun penelitian 2020 d. Membahas mengenai pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i>

		<p>usaha yang dijalankan sesuai syariat Islam, BPRS mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Faktor penghambat, yaitu untuk sektor UKM bersaing dengan bank umum, kurangnya tingkat pemahaman kepada produk bank syariah.</p>	
2.	<p>Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Abdul et al., 2024)</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Karawang berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang memerlukan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Namun, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh BPRS dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang.</p>	<p>Persamaan:</p> <p>a. Variabel persepsi manfaat dan kegunaan BPRS</p> <p>Perbedaan:</p> <p>b. Lokasi penelitian</p>
3.	<p>Peran Bank Pembiayaan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Bank Pembiayaan</p>	<p>Persamaan:</p> <p>a. Variabel manfaat</p>

	Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung (Ahmad Fauzi, 2019)	Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya sebatas penyedia pembiayaan bagi Masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha.	BPRS terhadap UMKM b. Metode Kualitatif Perbedaan: a. Lokasi penelitian b. Tahun penelitian 2019 c. Variabel peran BPRS dalam
4.	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa) (Rifdah & Ahmad, 2024)	Temuan dari penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran BPRS dalam mendukung sektor UMKM dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mempromosikan pengembangan UMKM yang berkelanjutan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.	Persamaan: a. Variabel peran manfaat BPRS terhadap UMKM b. Metode Kualitatif Perbedaan: a. Lokasi penelitian b. Penelitian hanya membahas peran terhadap UMKM
5.	Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan	Hasil dari penelitian ini adalah BPRS Lantabur Tebuireng Sidoarjo	Persamaan:

	<p>Jumlah Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Sidoarjo</p> <p>(Aini & Maika, 2022)</p>	<p>menggunakan segmentasi pasar Bank pada segmentasi pasar investasi, serta targetting terletak pada kalangan menengah kebawah melalui maksimalkan kegiatan UMKM.</p>	<p>a. Pemasaran BPRS terhadap Masyarakat</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Lokasi Penelitian b. Tahun Penelitian 2020 c. Membahas Pemasaran BPRS</p>
6.	<p>Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan Umkm Di Indonesia</p> <p>(Purnama et al., 2024)</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BPRS telah sukses menerapkan manajemen yang efektif dalam mengelola rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan, terutama untuk sektor UMKM. BPRS juga berhasil meraih tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam pembiayaan UMKM, yang terlihat dari peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan setiap tahunnya.</p>	<p>Persamaan:</p> <p>a. Variabel peran manfaat BPRS terhadap UMKM b. Metode Kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Ruang lingkup penelitian b. Hanya membahas kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan</p>

7.	<p>Peran PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanh Bangsa Dalam Penyaluran Kredit Kepada Pengusaha Kecil Di Sidamanik (Tambunan & Indra, 2022)</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan Peran BPRS di sektor UMKM kota Palopo sangat penting dan telah dibuktikan melalui beberapa strategi: Pembinaan pengelolaan koperasi, pengembangan sistem keuangan mikro, kemitraan dalam bentuk kerjasama pembiayaan bagi pengusaha kecil dan mikro. Dengan demikian, dampak yang dirasakan masyarakat terhadap pengembangan dan penguatan UMKM Palopo menjadi penting secara strategis.</p>	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaruh peran BPRS terhadap UMKM b. Metode Kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Tahun penelitian 2022
8.	<p>Analisis Pengaruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Pertumbuhan dan Pengembangan Ukm di Indonesia</p>	<p>Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa BPRS telah berhasil menerapkan praktik manajemen yang efektif dalam mengelola rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan, khususnya untuk sektor UMKM. BPRS juga telah mendapatkan tingkat</p>	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan terhadap pelaku UMKM b. Metode Kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian b. Rasio pihak ketiga

	(Rahmah & Karem, 2024)	kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam pembiayaan UMKM, yang tercermin dari peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan setiap tahunnya.	
9.	Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Aceh Sejahtera Dalam Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Fathin, 2024)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BPRS Arthaaceh Sejahtera dalam merespon Qanun LKS melakukan strategi sistematis yang terbagi menjadi fase sebelum dan sesudah konversi dimana pada fase sebelum konversi mereka melakukan perencanaan penguatan syariah serta melakukan mapping terhadap sistem, kualitas, pemindahan akad serta kualitas aset.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Strategi dan perencanaan BPRS b. Metode Kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian b. Membahas BPRS sebelum dan sesudah konversi
10.	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya variabel dep ratio yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaruh BPRS terhadap ekonomi <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian

	Regional di Indonesia (Syathiri & Adhitama, 2022)	yang diproksi oleh Produk Domestik Regional Bruto PDRB. Tetapi, berdasarkan uji F, variabel FDR dan Dep Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB	b. Menganalisis pengaruh rasio
--	---	--	--------------------------------

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mendorong kemajuan perekonomian masyarakat, khususnya dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di tengah tantangan ekonomi global dan dampak dari berbagai krisis, peran BPRS menjadi semakin relevan sebagai lembaga yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan sosial dalam setiap transaksi, BPRS menjadi mitra strategis bagi masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. Untuk memastikan ketelitian penelitian ini, landasan teori yang digunakan perlu diperkuat dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Siddiqi, Untuk penjelasan lebih rinci, hal ini dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Teori Siddiqi yang menekankan pentingnya bagi hasil diterapkan di BPRS melalui skema pembiayaan berbasis syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

BPRS memberikan dana kepada nasabah (pengusaha kecil) untuk menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan rasio yang telah disepakati di awal. Jika usaha mengalami kerugian, bank akan menanggungnya sesuai dengan prinsip *mudharabah*, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Dalam skema *musyarakah*, BPRS dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal untuk usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal yang disumbangkan. Ini menciptakan keadilan, karena risiko dan hasil usaha dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah.

2. Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil

Siddiqi percaya bahwa ekonomi Islam harus mendukung keadilan sosial dan memberdayakan masyarakat. Penerapan prinsip ini dalam BPRS terlihat dari fokus bank pada penyediaan pembiayaan kepada sektor mikro, kecil, dan menengah. Konsep utama:

- a. Jaminan Kebutuhan Dasar: Siddiqi menekankan pentingnya jaminan kebutuhan dasar bagi individu yang tidak mampu bekerja, seperti yang terlihat dalam program bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pokok.

- b. Distribusi Kekayaan yang Merata: Ekonomi syariah bertujuan untuk distribusi kekayaan yang merata, terutama kepada yang lemah dan membutuhkan, melalui mekanisme ekonomi (jual-beli) dan non-ekonomi (zakat, infak, sedekah).
- c. Integrasi Etika dan Ekonomi: Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada etika dan moralitas untuk mencegah kesenjangan sosial dan membentuk peradaban yang humanis, di mana harta hanyalah sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial.
- d. Prinsip Kemanusiaan: Ekonomi Islam menaungi prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabah*), bahu-membahu (*takaful*), dan saling tolong-menolong (*ta'awun*) antara si kaya dan si miskin.

3. Penghapusan Riba dan Penghindaran Spekulasi (Gharar)

BPRS, sesuai dengan prinsip syariah dan teori Siddiqi, tidak mengenakan bunga (riba) pada pembiayaan yang diberikan. Sebagai gantinya, BPRS menggunakan kontrak berbasis keuntungan seperti *murabahah* (jual beli) atau *ijarah* (sewa) untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil tanpa unsur eksploitasi.

Melalui skema *murabahah*, BPRS membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Sementara dalam akad *ijarah*, BPRS menyewakan aset kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Kedua akad ini mencerminkan prinsip

transparansi, keadilan, dan kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, yang merupakan inti dari ekonomi Islam menurut Siddiqi.

4. Prinsip Etika dalam Bisnis dan Perbankan

Siddiqi menekankan pentingnya etika dalam perbankan dan bisnis. Dalam operasinya, BPRS menerapkan etika bisnis Islam dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Ini tercermin dalam kontrak antara BPRS dan nasabah bersifat jelas dan transparan, dengan tujuan untuk menghindari ketidakadilan dan kesalahpahaman. Nasabah diberitahu tentang semua biaya dan margin keuntungan di awal.

Konsep etika bisnis mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Etika bisnis dalam industri perbankan merujuk pada prinsip dan norma yang mengatur perilaku bank dan lembaga keuangan dalam menjalankan operasional mereka. Konsep ini sangat penting karena industri perbankan berperan krusial dalam perekonomian, dan keputusan yang diambil oleh bank dapat memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam industri perbankan, etika bisnis berperan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Teori etika yang sering diterapkan dalam konteks ini termasuk utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Utilitarianisme menekankan pada hasil yang maksimal bagi semua pemangku kepentingan, sedangkan deontologi memfokuskan pada kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti.

Etika kebajikan, di sisi lain, mendorong individu untuk mengembangkan karakter baik yang mendasari keputusan etis.

Penerapan etika bisnis dalam perbankan tidak hanya berkontribusi pada reputasi bank, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga perbankan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan mereka.



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial secara menyeluruh,

khususnya yang berkaitan dengan peran strategis BPRS Patriot Bekasi dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kota Bekasi. Penelitian kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengungkap dan meneliti sikap, persepsi, dan pengetahuan informan secara menyeluruh. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti dapat menyelidiki fungsi BPRS sebagai organisasi sosial yang mendukung ekonomi lokal berdasarkan syariah di samping posisinya sebagai lembaga keuangan. Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan interpretasi data yang lebih mudah beradaptasi berdasarkan situasi lapangan.

Tujuan dari penelitian kualitatif, menurut Walidin (2015) adalah untuk memahami fenomena sosial (manusia), yang kemudian dapat diekspresikan secara verbal setelah dideskripsikan secara holistik dan rumit. Pemeriksaan menyeluruh terhadap partisipan penelitian dan sumber informan yang dilakukan dalam lingkungan yang alamiah merupakan aspek lain dari penelitian kualitatif.

Peneliti berpendapat bahwa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat lebih memahami bagaimana peran strategis operasional pembiayaan BPRS Patriot Bekasi dalam mendorong perekonomian masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan studi kasus dengan metode *non-probability sampling*. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang menekankan analisis mendalam terhadap individu, kelompok, institusi, atau fenomena tertentu dalam periode waktu tertentu

(Sugiarto. 2017:12). Adapun *non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk dijadikan sampel. Tujuan studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif latar belakang masalah, kondisi, dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung, beserta interaksi lingkungan dari unit sosial tertentu sebagaimana adanya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan makna, menelaah proses, serta memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai individu, kelompok, atau situasi tertentu.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang penyajiannya tidak dituangkan dalam bentuk angka. Melalui metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh akan dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, kemudian dianalisis serta dipadukan sehingga menghasilkan gambaran yang utuh, jelas, dan terarah mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Sella Puspita Sari, 2020).

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPRS Patriot Kota Bekasi, yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 177, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada posisi strategis BPRS Patriot sebagai salah satu lembaga keuangan syariah lokal yang memiliki peran aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Bekasi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan, yaitu September hingga Desember 2025, mencakup tahap pengumpulan data sekunder, analisis, serta penyusunan laporan hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi periode tahun 2020-2024, untuk memberikan gambaran yang aktual dan relevan mengenai perkembangan operasional pembiayaan BPRS Patriot.

4. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, maka subjek penelitian bukan berupa individu atau responden, melainkan berupa dokumen dan data publik yang relevan, antara lain:

1. Laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan publikasi BPRS Patriot periode 2020–2024.
2. Laporan statistik perbankan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
3. Publikasi ilmiah, jurnal, dan buku yang membahas tentang peran BPRS dan pembiayaan syariah dalam pembangunan ekonomi.
4. Data perekonomian Kota Bekasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kota Bekasi.

5. Objek Penelitian

Peran strategis operasional pembiayaan pada BPRS Patriot Kota Bekasi mencakup berbagai aspek, seperti mekanisme pelaksanaan pembiayaan, strategi operasional yang diterapkan, kendala yang dihadapi dalam penyaluran

pembiayaan, serta kontribusinya terhadap peningkatan dan perkembangan perekonomian masyarakat Kota Bekasi.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui penelitian atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Sugiyono (2016), “data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak secara langsung.” Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lainnya. Penggunaan data sekunder memiliki keunggulan, antara lain memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dan menghemat waktu penelitian. Namun, keterbatasannya terletak pada ketersediaan sumber yang relevan dengan tujuan penelitian yang terkadang masih terbatas. Teknik pengumpulan data sekunder juga digunakan untuk memperkuat temuan penelitian serta melengkapi informasi yang telah diperoleh.

7. Sampel Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif, teknik *purposive sampling* dipilih untuk mendapatkan sampel yang relevan dan memiliki wawasan mendalam mengenai peran BPRS Patriot dalam mendukung ekonomi masyarakat di Kota Bekasi. Adapun sampel yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari sejumlah pemberitaan media daring nasional yaitu Bekasi.co.id Pemilihan media tersebut didasarkan pada kredibilitas, aksesibilitas, serta konsistensi publikasi terkait topik penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh

peneliti. Teknik pengambilan sampel yang dimulai dari sejumlah kecil sumber data, lalu berkembang menjadi lebih banyak seiring waktu.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Bekasi, dengan kepemilikan saham sebesar 99,30% oleh pemerintah kota. Pendirian BPRS Patriot bertujuan agar masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai prinsip syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang sesuai syariah. Kegiatan utama BPRS Patriot meliputi penghimpunan dana masyarakat melalui produk tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*, serta penyaluran pembiayaan dengan prinsip *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena berfungsi untuk memperoleh data yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dan meta-analisis. Menurut (Punaji Setyosari, 2016) dalam penelitian (Adzkiya, 2021) mendefinisikan bahwa kajian literatur merupakan uraian atau deskripsi mengenai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, meta-analisis digunakan sebagai teknik untuk menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya secara statistik, berdasarkan data dari studi primer.

Teknik analisis data dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan peneliti dalam mengolah dan menafsirkan data, yang dilaksanakan melalui empat tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni apakah BPRS berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan BPRS, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jurnal ilmiah, artikel, serta literatur-literatur lainnya yang mendukung kajian.
2. Mengidentifikasi data; Setelah data sekunder terkumpul, peneliti melakukan proses identifikasi untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian yang digunakan. Identifikasi data dilakukan dengan memilah informasi berdasarkan topik, periode waktu, serta keterkaitannya dengan variabel penelitian, yaitu kinerja BPRS dan indikator ekonomi masyarakat.
3. Mendeskripsikan data; data yang telah diidentifikasi dideskripsikan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai karakteristik data, konteks, dan hubungan antar variabel yang diteliti.
4. Menyimpulkan Data; yaitu dengan menganalisis data yang telah dideskripsikan untuk menarik kesimpulan sementara mengenai pengaruh BPRS terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam pembahasan dan penarikan kesimpulan akhir penelitian (Umar Sidiq, 2019).

Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa kajian literatur dan meta-analisis memberikan landasan teoritis bagi peneliti dalam menyusun pembahasan yang sesuai dengan variabel penelitian. Temuan-temuan ini diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan diperkuat melalui analisis data primer, seperti jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

9. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam penelitian Adzkia, 2021), teknik analisis data adalah proses untuk mengumpulkan, menyusun, dan menata data secara sistematis dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan bahan lainnya, sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuan penelitian dapat disampaikan kepada pihak lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, memecahnya menjadi unit-unit, menyintesis, menyusun pola, menentukan informasi yang relevan untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain. Penelitian ini dilakukan dengan analisis terhadap literatur yang berkaitan pada topik pembahasan.

Menurut Nasution dalam (penelitian Adzkia, 2021) Analisis data dimulai sebelum peneliti terjun ke lapangan dan dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh hasil penelitian. Dengan kata lain, teknik analisis data tidak menunggu seluruh data terkumpul, melainkan dilakukan secara bertahap. Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016), aktivitas analisis data berlangsung secara interaktif dan terus-menerus sampai mencapai titik jenuh, sehingga data yang dikumpulkan sudah mencukupi untuk diolah dan dianalisis.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Milles and Huberman. Langkah-langkah dalam model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) dalam penelitian (Barlian et al., 2023) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis data yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti merangkum dan menyeleksi informasi yang pokok, serta memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Data yang dianalisis berasal dari hasil pengumpulan data sekunder, antara lain buku teks, jurnal, artikel, skripsi, peraturan pemerintah, ensiklopedia, serta berbagai sumber tertulis lainnya, baik yang tercetak maupun tidak tercetak, yang relevan dengan topik penelitian.
2. Dalam pendekatan kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan secara deskriptif atau naratif. Hal ini dikarenakan setiap data yang diperoleh saling terkait dengan data lainnya, sehingga pemahaman terhadap satu data tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Penyajian data bertujuan untuk menjadi dasar dalam menafsirkan temuan serta menarik kesimpulan penelitian, sekaligus menjawab permasalahan yang dikaji.
3. Verifikasi merupakan tahap pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dalam penelitian ini. Pertama, peneliti menyusun simpulan sementara, yang kemudian diperkuat melalui verifikasi data seiring bertambahnya informasi, guna memperoleh kesimpulan yang lebih objektif. Kedua, penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan

kesesuaian pernyataan responden terhadap makna yang terkandung dalam permasalahan penelitian secara konseptual.

10. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi merupakan salah satu konsep metodologis penting yang perlu dipahami oleh peneliti. Tujuan dari triangulasi adalah untuk memperkuat keabsahan teori, metode, serta hasil interpretasi penelitian. Secara sederhana, triangulasi berarti proses pengecekan data dengan menggunakan beragam sumber, metode, dan waktu yang berbeda (Mekarisce, 2020)

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian dan memperoleh pemahaman yang komprehensif, penulis menyusun pembahasan secara sistematis dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada BAB II berisikan tentang teori-teori yang berhubungan pada penelitian ini yaitu definisi Lembaga Keuangan Syariah, definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Karakteristik BPRS, Strategi Operasional BPRS, Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, *review* studi terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini berisikan tentang metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian, sumber data, jenis data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini berisikan tentang pembahasan yang didapat pada hasil penelitian yaitu sejarah BPRS Patriot Bekasi, Produk UMKM, Struktur organisasi BPRS Patriot Bekasi, Analisis kesesuaian fatwa pada produk pembiayaan UMKM.

BAB V KESIMPULAN

Yaitu berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.

